



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : 503/0022/PPNF / 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PAUD KELOMPOK BERMAIN IFTAH ROZUKI  
YAYASAN IFTAH ROZUKI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

mbang

- a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Yayasan Iftah Rozuki Sdr. Saib Mustaqim Harahap Tanggal 18 April 2018, Perihal Permohonan Izin Satuan/Program Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perizinan Pendidikan Non Formal Swasta dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;



11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian Pada Kursus Dan Pelatihan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus Dan Pelatihan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus Dan Pelatihan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
20. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha Dan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

perhatikan

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor:503/227/DMPPTSP/2018 tanggal 19 Juli 2018 Perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Yayasan Iftah Rozuki:

#### MEMUTUSKAN

etapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PAUD KELOMPOK BERMAIN IFTAH ROZUKI YAYASAN IFTAH ROZUKI

TAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kepada

1. Nama Satuan Pendidikan : Yayasan Iftah Rozuki
2. Jenis Satuan Pendidikan : Yayasan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
3. Nama Ketua Badan Pengurus : SAIB MUSTAQIM HARAHAHAP
4. Akta Pendirian : Notaris Manahan Harahap, SH., M.Kn Nomor 43 Tanggal 06 Februari 2015
5. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Balimbing Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
6. Alamat Badan Pengurus : Desa Balimbing Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

DUA

Satuan Pendidikan tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Swasta atau Badan Swasta lain;

TIGA

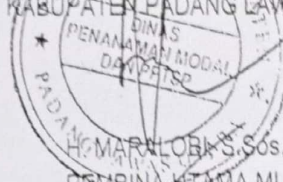
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan 08 Maret 2021 dengan Ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) diktum Kedua diatas tidak dipatuhi maka surat keputusan ini dinyatakan batal;

MPAT

Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua  
Pada tanggal : 03 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



H. MARULOK S. Sds, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660427 198602 1 003

isan

Gubernur Sumatera Utara di Medan;  
Direktur Jenderal PAUD dan PNFI di Jakarta;  
Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Jakarta;  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;  
Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;  
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Halongonan;  
Arsip.

GRATIS



ANTARA KAN